

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692014/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
- 4. Kode/Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 22.703.760.000 (DUA PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 22.703.760.000
Rp. 22.703.760.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 22.703.760.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 22.703.760.000

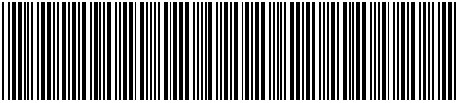
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
I A. INFORMASI KINERJA



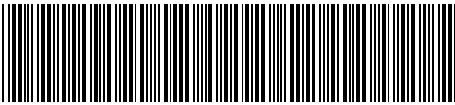
DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				22.703.760.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				22.703.760.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	18.336.278.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah		2.00	Laporan	142.728.000
		02	EBA.002	Layanan Kerja Sama		1.00	Laporan	115.110.000
		03	EBA.956	Layanan BMN		1.00	Layanan	9.710.000
		04	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	449.079.000
		05	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	140.038.000
		06	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	245.709.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	17.233.904.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		295,00	Unit, m2, Paket	3.611.934.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		293.00	Unit	2.655.306.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2.00	Unit	956.628.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		99,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	308.410.000
Rincian Output	:	01	EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		1.00	Layanan	36.100.000
		02	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		98.00	Orang	272.310.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	447.138.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		2.00	Laporan	199.170.000
		02	EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		3.00	Dokumen	24.480.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
I A. INFORMASI KINERJA

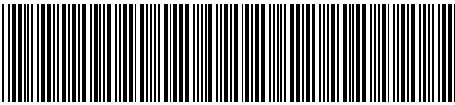


DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	140.723.000
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	16.605.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	12.220.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	50.680.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	3.260.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7492-5432-9303-5319

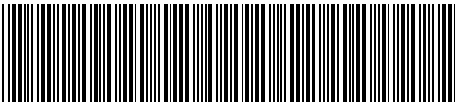
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	22.703.760.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	22.703.760.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



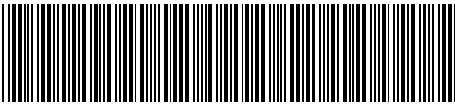
DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692014	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	13.093.458	5.998.368	3.611.934	-	-	22.703.760	12 . 00	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.093.458	5.998.368	3.611.934	-	-	22.703.760		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.093.458	5.998.368	3.611.934	-	-	22.703.760		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	13.093.458	5.242.820	-	-	-	18.336.278		
01	RM	13.093.458	5.242.820	-	-	-	18.336.278		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	-	3.611.934	-	-	3.611.934		
01	RM	-	-	3.611.934	-	-	3.611.934		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	308.410	-	-	-	308.410		
01	RM	-	308.410	-	-	-	308.410	017@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	447.138	-	-	-	447.138		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

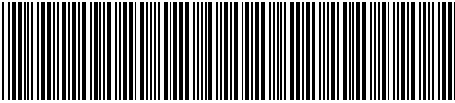
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	447.138	-	-	-	447.138	017@	
JUMLAH		13.093.458	5.998.368	3.611.934	-	-	22.703.760		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692014) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

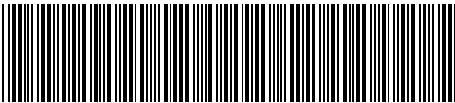
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692014	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.072.626	2.144.434	2.281.463	4.939.151	1.309.336	2.275.489	1.511.871	1.314.133	1.649.386	2.366.153	1.143.389	696.329	22.703.760
		BELANJA PEGAWAI	915.746	1.044.931	2.020.470	1.766.499	951.194	1.776.199	951.194	951.194	960.894	951.194	803.943	0	13.093.458
		BELANJA BARANG	156.880	1.099.503	260.993	517.346	358.142	499.290	560.677	362.939	688.492	458.331	339.446	696.329	5.998.368
		BELANJA MODAL	0	0	0	2.655.306	0	0	0	0	0	956.628	0	0	3.611.934
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.072.626	2.144.434	2.281.463	4.939.151	1.309.336	2.275.489	1.511.871	1.314.133	1.649.386	2.366.153	1.143.389	696.329	22.703.760
		51 BELANJA PEGAWAI	915.746	1.044.931	2.020.470	1.766.499	951.194	1.776.199	951.194	951.194	960.894	951.194	803.943	0	13.093.458
135.01.WA.7099		52 BELANJA BARANG DAN JASA	156.880	1.099.503	260.993	517.346	358.142	499.290	560.677	362.939	688.492	458.331	339.446	696.329	5.998.368
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	2.655.306	0	0	0	0	0	956.628	0	0	3.611.934

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
IV A. B L O K I R



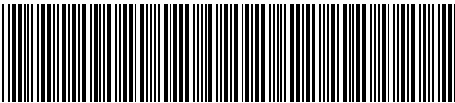
DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692014] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692014	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	7099.EBB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.950
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.058.352		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.446.418		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.01.WA	53 Belanja Modal Rp. 3.611.934	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
	Program Dukungan Manajemen		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.655.306
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7099.EBC	Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 89.549		533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025	7099.EBC	Catatan Rehabilitasi Rumah Negara Gol I Tipe B (120 M2) dan Rehabilitasi Rumah Negara Gol I Tipe C (70 M2)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 956.628
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100	7099.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Layanan Manajemen SDM Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	7099.EBC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.770
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.750		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7099.EBC	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.343		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025	7099.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 593.802	7099.EBC	Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	7099.EBC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.879

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
IV A. B L O K I R



DS:7492-5432-9303-5319

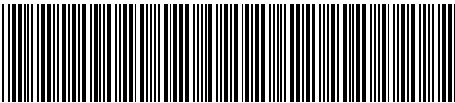
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692014] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7099.EBD	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.387		
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000		
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.824		
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.600		
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.864		
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692014/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7492-5432-9303-5319

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692014] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692014	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 956.628		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehabilitasi Rumah Negara Gol I Tipe B (120 M2) dan Rehabilitasi Rumah Negara Gol I Tipe C (70 M2) Rp. 956.628		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA